

# RENCANA KERJA (RENJA) 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



DINAS SOSIAL

JL. ANDALAS NO. 49 KEL. JEPPE'E KEC. TANÉTÈ RIATTANG BARAT

KOTA WATAMPONE

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE

Sekretariat :

Jl. Andalus No. 49 Telp./Fax. 0481-21029

Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat 92732

Watamponè Kabupatèn Bonè Sulawesi Selatan

Email: [dinas.kesos.kabbong@gmail.com](mailto:dinas.kesos.kabbong@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

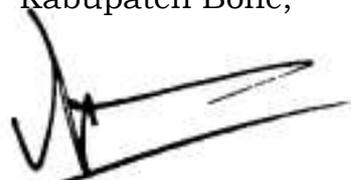
Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya serta tuntunan-Nya sehingga penyusunan **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2020 dapat terselesaikan. Hal ini sebagai suatu langkah awal untuk mewujudkan penyelenggaraan Good Governance dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial.

**Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan kebijakan publik mengenai sistem perencanaan dibidang kesejahteraan sosial yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA - SKPD dan selanjutnya menjadi DPA - SKPD karena memuat arah kebijakan pembangunan tahun berikutnya berpedoman pada tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yakni **“Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud melalui **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone kiranya dapat menjadi nilai tambah dan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya dan dapat membenahi kekurangan yang ada untuk menyusun dokumen yang lebih baik lagi.

Watampone, 27 Mei 2019

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bone,



**Drs. ANDI RUSLAN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19590723 198603 1 017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>12</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat Daerah ...	12
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	50
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	52
3.3. Program dan Kegiatan .....	54
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

<b>2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Propinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>13</b>
<b>2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayan Perangkat Daerah Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone</b>	<b>23</b>
<b>2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone</b>	<b>28</b>
<b>2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone</b>	<b>48</b>
<b>3.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>53</b>
<b>3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone</b>	<b>55</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Proses pemerintahan kian tahun kian mengalami perkembangan. Perubahan paradigma pemerintahan yang baru yang kian menuntut kinerja aparatur yang transparan, akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good government*), serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perkembangan pemerintahan yang kian terus berpacu menuntut Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja harus dimulai dari sistem perencanaan yang baik, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan berupa monitoring dan evaluasi.

Paradigma pemerintahan yang lama hanya menitikberatkan sistem pengawasan (monitoring dan evaluasi) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, tetapi sekarang aparatur mulai dievaluasi mulai dari sistem perencanaan sampai pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan, termasuk sistem penganggaran. Sehingga dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan, maka dibutuhkan sebuah proses perencanaan yang matang.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun ditetapkan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD.

Dalam sebuah Instansi Pemerintahan, setiap perencanaan dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja (RENJA). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) adalah suatu perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya atas penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja yang dilakukan oleh PD harus diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Bone Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Serta Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone karena Renja merupakan penjabaran Renstra yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang secara teknis dilakukan oleh PD teknis masing-masing, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengahDaerah. Penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagai berikut :

- Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

- Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD).
- Pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

#### 1.1.1. Pengertian Renja

Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

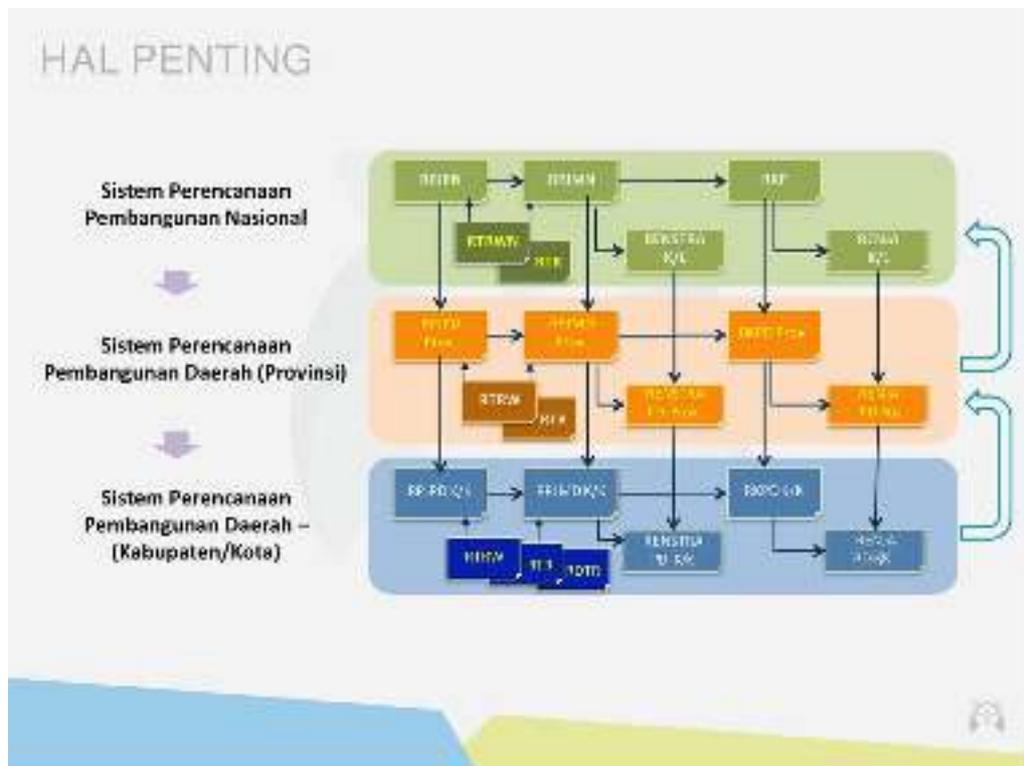
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bone yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

### 1.1.2. Mekanisme penyusunan Renja

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja PD menjadi mutlak, yaitu Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone 2020 harus disinkronisasikan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi. Pembahasan Renja PD pada Forum PD Kabupaten/Kota Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Pengesahan Renja-PD oleh Bupati Bone. Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone 2020 dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

### 1.1.3. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:



## 1.2. Landasan Hukum

Pada dasarnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (Amnibus Regulation) dari berbagai Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

6. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014.
11. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
15. Peraturan Menteri Sosial atau Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
16. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018.
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.
28. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020.
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan capaian prestasi sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan tujuannya yaitu harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan anggaran satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dananya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2018 -2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone Tahun 2020. Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Renja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kab. Bone.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategi & kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Visi: “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Untuk merealisasikan visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang akan diwujudkan serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bone, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

**Misi:**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Hal ini merupakan bentuk sinkronisasi dokumen perencanaan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Bone terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2020 sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA-PD) Dinas Sosial Kab. Bone pada Tahun 2020,
2. Menetapkan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2020,
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta Pagu Anggaran Dinas Sosial Kab. Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan** : Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu** : Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** : Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah** : Menyajikan gambaran Rencana Kerja Perangkat

Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 5 Penutup** : Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk menjamin pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2018 yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi juga dimaksudkan guna menjaga kesinambungan dan sekaligus melihat secara realita program yang bermanfaat dan efektif kepada masyarakat dan menjadi acuan pertimbangan bagi program kegiatan yang tak terealisasi dalam upaya penyusunan Program dan Kegiatan berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja atas tujuh (7) sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Inspektur Daerah Kab. dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

lembar.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Sosial									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)	100					100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa komunikasi (telepon/Faximile/Internet, TV Kabel dan Air) (Rekening)	300	100	100	100	100,00	60,00	260,00	86,67

			Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayarkan (STNK)	98	0	0	0	0,00	14,00	14,00	14,29
			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	1560	100	100	100	100,00	312,00	512,00	32,82
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor tersedia (paket)	60	100	100	100	100,00	12,00	212,00	353,33
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali)	300	5	11	8	72,73	60,00	73,00	24,33
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti (kegiatan)	250	100	100	100	100,00	50,00	250,00	100,00
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	240	100	100	100	100,00	48,00	248,00	103,33
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)</b>	<b>100</b>					<b>100,00</b>		
			Kegiatan Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	15	1	1	3	300,00	2,00	6,00	40,00
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (Paket)	25	9	4	1	25,00	5,00	15,00	60,00
			Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor (Paket)	23	14	19	13	68,42	3,00	30,00	130,43
			Kegiatan Pengadaan Meubeleu	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	15	5	29	13	44,83	2,00	20,00	133,33
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara (Unit)	8	1	1	1	100,00	1,00	3,00	37,50
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (paket)	98	9	15	9	60,00	14,00	32,00	32,65
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara (Kegiatan)	60	0	0	0	0,00	12,00	12,00	20,00
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki (kegiatan)	60	14	13	12	92,31	12,00	38,00	63,33
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang di pelihara (Kegiatan)	60	0	0	0	0,00	12,00	12,00	20,00
			Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (paket)	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Program Peningkatan Sumber Daya</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan</b>	<b>100</b>					<b>100,00</b>		

Aparatur	Sumber Daya Aparatur (Persen)									
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	10	2	4	0	0,00	1,00	3,00	30,00	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Cakupan Realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)</b>	<b>100</b>					<b>100,00</b>			
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang disusun (Dokumen)	40	0	0	0	0,00	8,00	8,00	20,00	
<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)</b>	<b>100</b>					<b>100,00</b>			
Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	27	0	0	0	0,00	6,00	6,00	22,22	
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</b>	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Persen)	99,5					96,16			
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang terlatih dan mampu melaksanakan tugasnya (Orang)	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang terlatih yang mampu menjalankan dan meningkatkan usahanya (Kelompok)	16	0	5	5	100,00	0,00	5,00	31,25	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin.	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan di Kabupaten Bone (Kelompok)	43	8	17	7	41,18	5,00	20,00	46,51	
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mempunyai keterampilan kerja (Orang)	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan.	Jumlah Koordinasi kecamatan yang melaksanakan program Keluarga harapan (kegiatan)	60	27	27	27	100,00	12,00	66,00	110,00	

			Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan (Kelompok)	26	5	7	5	71,43	4,00	14,00	53,85
			Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	jumlah koordinasi kecamatan yang menjadi lokus pendataan PMKS dan PSKS (Kegiatan)	27	27	27	27	100,00	12,00	66,00	244,44
			Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan bimbingan dan bantuan kesejahteraan sosial (Kelompok)	28	0	0	0	0,00	5,00	5,00	17,86
			Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat terpencil lainnya	Jumlah Kelompok masyarakat KAT dan Masyarakat terpencil yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (Kelompok)	15	0	0	0	0,00	3,00	3,00	20,00
			Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang mendapatkan pembekalan tentang keterampilan berusaha (Kelompok)	4	0	0	0	0,00	2,00	2,00	50,00
			Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	Jumlah Koordinasi Kecamatan yang menjadi lokus pelayanan bantuan stimulan (Kegiatan)	60	0	0	0	0,00	12,00	12,00	20,00
			<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)	100					80,25		
			Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS khususnya bagi Peka dan Lansia yang responsif gender (paket)	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Sosial yang tertangani (Orang)	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana (Kegiatan)	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak PMKS yang mendapatkan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah PMKS termasuk korban bencana yang mendapatkan pelayanan Psikososial yang terlayani (Orang)	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	Jumlah Pusat Informasi PMKS yang terbentuk (unit)	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS dalam pelaksanaan Rehabilitasi (Unit)	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Buku, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis tentang PMKS yang diterbitkan (Eksamplar)	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	jumlah koordinasi kecamatan pelaksanaan koordinasi dalam perumusan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan (kegiatan)	60	0	0	0	0,00	12,00	12,00	20,00
			Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	jumlah pelayanan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial (kegiatan)	60	100	100	100	100,00	12,00	212,00	353,33
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial (kegiatan)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	jumlah pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi korban bencana sosial (kegiatan)	60	0	0	0	0,00	12,00	12,00	20,00
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	jumlah pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi korban bencana alam (kegiatan)	60	0	0	0	0,00	12,00	12,00	20,00
			Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang memperoleh perlindungan sosial (orang)	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang terlayani dan memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	45	5	7	6	85,71	5,00	16,00	35,56
			<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (Persen)	100					25,00		

			Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar	Jumlah Bangunan yang dibangun untuk sarana penampungan anak terlantar (Unit)	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Jumlah dokumendata hasil Veriifikasi dan Validasi Data untuk Anak Terlantar (dokumen)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	44	25	25	5	20,00	5,00	35,00	79,55
			Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Jumlah kegiatan pembinaan bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mendapatkan peningkatan keterampilan (Kegiatan))	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan anak terlantar yang dilakukan (kegiatan)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas.</b>	Persentase Disabilitas Fisik dan Mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (Persen)	<b>98,1</b>					<b>48,15</b>		
			Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data untuk penyandang cacat dan eks trauma (kegiatan)	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah gedung Perawatan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dibangun (Unit)	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat/ Disabilitas dan Eks Trauma yang dididik dan dilatih (Orang)	58	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pendayagunaan para Disabilitas dan Eks Trauma	jumlah bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan penyandang disabilitas dan eks trauma (orang)	51	25	36	6	16,67	5,00	36,00	70,59
			Peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan pelatih	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik (pelatih) penyandang cacat dan eks	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

				trauma (kegiatan)									
				<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).</b>	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (Persen)	25,15					18,21		
				Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (Orang)	150	0	0	0	0,00	20,00	20,00	13,33
				Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Pembinaan dan Pemberdayaan (Orang)	44	0	0	0	0,00	5,00	5,00	11,36
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya (kegiatan)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</b>	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Persen)	9,09					5,05		
				Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	jumlah kegiatan pelibatan dunia usaha yang berperan dalam usaha kesejahteraan masyarakat (kegiatan)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bone (Karang Taruna)	17	3	6	3	50,00	1,00	7,00	41,18
				Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan/pelatihan Peningkatan Kualitas SDM(Orang)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	jumlah pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial pada kecamatan di kabupaten bone (kecamatan)	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pemberdayaan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan sosial (Orang)	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pemberdayaan Panti Sosial	Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Panti)	5	0	0	0	0,00	1,00	1,00	20,00
			Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial	jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pendamping dan petugas sosial (kegiatan)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial</b>	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani (Areal)	1					1,00		
			Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana areal taman makam pahlawan (kegiatan)	5	1	1	1	100,00	1,00	3,00	60,00
			Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	jumlah kegiatan partisipasi organisasi/lembaga/dunia usaha yang dalam peningkatan nilai keahlawanan dan kesetiakawanan sosial (kegiatan)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pelaksanaan Expo Kesetiakawanan Sosial	jumlah pelaksanaan kegiatan ekspo organisasi sosial/lembaga dalam pelaksanaan HKS (Kegiatan)	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Sejak Tahun 2018 telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Dinas Sosial Kabupaten Bone) dan telah ditetapkan masing - masing indikator target kinerja yang masing masing terdiri dari

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 2 indikator yakni:
  - 1) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
  - 2) Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 1 indikator umum yakni
  - 1) Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIPserta 2 indikator teknis yakni
  - 1) Persentase PMKS yang Tertangani
  - 2) Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial
- c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari 7 indikator meliputi:
  - 1) Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
  - 2) Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat
  - 3) Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya
  - 4) Persentase Disabilitas dan Mental potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan

- 5) Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani
- 6) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 7) Jumlah Areal pemakaman yang di tangani

Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu instansi yang menjalankan tugas pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, jaminan maupun pemberian bantuan sosial telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

Adapun rincian perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja dari RPJMD dan Renstra 2018, 2019 dan 2020 bidang Sosial baik dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

## Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti}} \times 100\%$	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	Tahun 2017 & 2018 Belum Terbit SPM
2.	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota	SPM	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}}{\text{Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	Tahun 2017 & 2018 Belum Terbit SPM

1.	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	IKU	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$	-	CC	B	B	CC	-	B	B	
2.	Persentase PMKS yang Tertangani	IKU	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terlayani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	-	95,35	95,35	96,55		-	95,35	96,55	
3.	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	IKU	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam pelayanan dan penanganan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100\%$	-	4,03	5,05	6,06		-	5,05	6,06	

1.	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	IKK	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	92,71	93,35	96,15	96,55	-	96,15	96,55
2.	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	IKK	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	62,69	73,35	80,25	87,15	-	80,25	87,15
3.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	IKK	$\frac{\text{Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$	0,00	0,00	25,00	50,00	-	25,00	50,00
4.	Persentase Disabilitas dan Mental potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan	IKK	$\frac{\text{Jumlah Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah Disabilitas dan Mental Potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	18,07	32,20	48,15	65,05	-	48,15	65,05

5.	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani	IKK	$\frac{\text{Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (Satu) tahun}}{\text{Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (Satu) tahun}} \times 100\%$	0,00	17,53	18,21	19,5		-	18,21	19,5	
6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial	IKK	$\frac{\text{Jumlah WKSMB dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKSMB dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$	4,03	4,03	5,05	6,06		-	5,05	6,06	
7.	Jumlah Areal pemakaman yang di tangani	IKK	$\frac{\text{Jumlah Areal Pemakaman yang telah ditangani}}{\text{Jumlah Areal Pemakaman yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$	1	1	1	1	1	-	1	1	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari sekian banyak jenis pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah dibagi habis pada semua Bidang/Seksi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagaimana telah diuraikan pada poin terdahulu diatas, maka yang menjadi isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah
4. Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas
5. Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya
6. Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial
7. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP)

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2.4.1.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>775.000.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>775.000.000</b>	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Penyediaan Jasa komunikasi (telepon/Faximile/Internet, TV Kabel dan Air) (Rekening)	60	60.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Penyediaan Jasa komunikasi (telepon/Faximile/Internet, TV Kabel dan Air) (Rekening)	60	60.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa		Jumlah STNK Kendaraan	16	7.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa		Jumlah STNK Kendaraan	16	7.500.000	

	Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Dinas/Operasional yang terbayarkan (STNK)				Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Dinas/Operasional yang terbayarkan (STNK)		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	312	100.000.000		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga Administrasi/Jasa Teknis lainnya yang mendapatkan jasa keuangan (orang)	312	100.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah alat kebersihan kantor tersedia (paket)	12	11.000.000		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Persentase Ketersediaan Jasa dan Alat Kebersihan (Persen)	12	11.000.000
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali)	60	12.000.000		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Media Penyedia Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Media)	60	12.000.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti (kegiatan)	50	300.000.000		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti (kegiatan)	50	300.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	48	170.000.000		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	48	170.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana</b>	<b>100</b>	<b>1.934.500.000</b>		<b>Program Peningkatan</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana</b>	<b>100</b>	<b>1.934.500.000</b>

dan Prasarana Aparatur		dan Prasarana Aparatur (Persen)			Sarana dan Prasarana Aparatur		dan Prasarana Aparatur (Persen)		
Kegiatan Pembangunan gedung kantor		Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)	1	1.500.000.000	Kegiatan Pembangunan gedung kantor		Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)	1	1.500.000.000
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	2	66.000.000	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	2	66.000.000
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (Paket)	5	85.000.000	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (Paket)	5	85.000.000
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor (Paket)	3	55.000.000	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor (Paket)	3	55.000.000
Kegiatan Pengadaan Meubeleu		Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	2	12.500.000	Kegiatan Pengadaan Meubeleur		Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	2	12.500.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara (Unit)	2	35.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara (Unit)	2	35.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (paket)	16	85.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasioanl yang terpelihara (Unit)	16	85.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara (Kegiatan)	12	5.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara (Unit)	12	5.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki (kegiatan)	12	7.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki (Paket)	12	7.500.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah mebeluer yang di pelihara (Kegiatan)	12	1.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah mebeluer yang di pelihara (Paket)	12	1.000.000
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (paket)	0	-	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit)	0	-
<b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	2	45.000.000	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	2	45.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>		<b>Cakupan Realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>		<b>Cakupan Realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>

	<b>&amp;Keuangan</b>					<b>&amp;Keuangan</b>				
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun (Dokumen)	8	50.000.000	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun (Dokumen)	8	50.000.000
	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>		<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>		<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran yang tersusun (Dokumen)	5	75.000.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran yang tersusun (Dokumen)	5	75.000.000
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</b>		Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Persen)	96,55	<b>932.000.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</b>		Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Persen)	96,55	<b>932.000.000</b>
	Peningkatan kemampuan (capacity building)		Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang terlatih dan	15	25.000.000	Peningkatan kemampuan (capacity building)		Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang terlatih dan	15	25.000.000

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya		mampu melaksanakan tugasnya (Orang)			petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya		mampu melaksanakan tugasnya (Orang)		
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin		Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang terlatih yang mampu menjalankan dan meningkatkan usahanya (Kelompok)	3	125.000.000	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin		Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang terlatih yang mampu menjalankan dan meningkatkan usahanya (Kelompok)	3	125.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin.		Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan di Kabupaten Bone (Kelompok)	9	85.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin.		Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan di Kabupaten Bone (Kelompok)	9	85.000.000
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Jumlah PMKS yang mempunyai keterampilan kerja (Orang)	30	50.000.000	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Jumlah PMKS yang mempunyai keterampilan kerja (Orang)	30	50.000.000
Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan.		Jumlah Koordinasi kecamatan yang melaksanakan	12	200.000.000	Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan.		Jumlah kecamatan yang melaksanakan program Keluarga	12	200.000.000

			program Keluarga harapan (kegiatan)				Harapan (Kecamatan)			
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi		Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan (Kelompok)	5	60.000.000	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi		Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan (Kelompok)	5	60.000.000	
Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		jumlah koordinasi kecamatan yang menjadi lokus pendataan PMKS dan PSKS (Kegiatan)	12	250.000.000	Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		Jumlah Kecamatan yang menjadi lokus pendataan PMKS dan PSKS (Kecamatan)	12	250.000.000	
Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir		Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan bimbingan dan bantuan kesejahteraan sosial (Kelompok)	5	60.000.000	Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir		Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan bimbingan dan bantuan kesejahteraan sosial (Kelompok)	5	60.000.000	

Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat terpencil lainnya	Jumlah Kelompok masyarakat KAT dan Masyarakat terpencil yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (Kelompok)	3	60.000.000	Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat terpencil lainnya	Jumlah Kelompok masyarakat KAT dan Masyarakat terpencil yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (Kelompok)	3	60.000.000
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang mendapatkan pembekalan tentang keterampilan berusaha (Kelompok)	2	60.000.000	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang mendapatkan pembekalan tentang keterampilan berusaha (Kelompok)	2	60.000.000
Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	Jumlah Koordinasi Kecamatan yang menjadi lokus pelayanan bantuan stimulan (Kegiatan)	12	70.000.000	Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	Jumlah Koordinasi Kecamatan yang menjadi lokus pelayanan bantuan stimulan (Kegiatan)	12	70.000.000
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)	87,15	<b>1.120.000.000</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)	87,15	<b>1.120.000.000</b>
Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS khususnya bagi Paca dan Lansia yang responsif gender (paket)	1	250.000.000	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS khususnya bagi Paca dan Lansia yang responsif gender (paket)	1	250.000.000

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Sosial yang tertangani (Orang)	10	50.000.000	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Sosial yang tertangani (Orang)	10	50.000.000
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana (Kegiatan)	1	100.000.000	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana (Kegiatan)	1	100.000.000
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak PMKS yang mendapatkan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	25	70.000.000	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak PMKS yang mendapatkan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	25	70.000.000
Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah PMKS termasuk korban bencana yang mendapatkan pelayanan Psikososial yang terlayani (Orang)	50	50.000.000	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah PMKS termasuk korban bencana yang mendapatkan pelayanan Psikososial yang terlayani (Orang)	50	50.000.000
Pembentukan pusat informasi	Jumlah Pusat Informasi PMKS yang	-	-	Pembentukan pusat informasi	Jumlah Pusat Informasi PMKS yang	-	-

	penyandang cacat dan trauma center		terbentuk (unit)				penyandang cacat dan trauma center		terbentuk (unit)		
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS dalam pelaksanaan Rehabilitasi (Unit)	1	80.000.000		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS dalam pelaksanaan Rehabilitasi (Unit)	1	80.000.000
	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Jumlah Buku, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis tentang PMKS yang diterbitkan (Eksamplar)	30	65.000.000		Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Jumlah Buku, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis tentang PMKS yang diterbitkan (Eksamplar)	30	65.000.000
	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan		jumlah koordinasi kecamatan pelaksanaan koordinasi dalam perumusan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan (kegiatan)	12	90.000.000		Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan		Jumlah kecamatan pelaksanaan koordinasi dalam perumusan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan (kecamatan)	12	90.000.000
	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang		jumlah pelayanan bantuan korban bencana alam dan	12	80.000.000		Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang	12	80.000.000

	Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa		bencana sosial (kegiatan)			Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa		terlayani (Persen)		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial (kegiatan)	1	25.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Dokumen Laporan yang diselesaikan (Dokumen)	1	25.000.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial		jumlah pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi korban bencana sosial (kegiatan)	12	60.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial		Persentase Korban Bencana Sosial yang memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial (Persen)	12	60.000.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam		jumlah pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi korban bencana alam (kegiatan)	12	60.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam		Persentase Korban Bencana Alam yang memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial (persen)	12	60.000.000
	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang memperoleh perlindungan sosial (orang)	5	50.000.000	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang memperoleh perlindungan sosial (orang)	5	50.000.000
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia		Jumlah Lanjut Usia yang terlayani dan	7	90.000.000	Pelayanan Sosial Lanjut Usia		Jumlah Lanjut Usia yang terlayani dan	7	90.000.000

		memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)					memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)			
<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>		Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (Persen)	50	<b>204.000.000</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>		Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (Persen)	50	<b>204.000.000</b>	
Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar		Jumlah Bangunan yang dibangun untuk sarana penampungan anak terlantar (Unit)	-	-	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar		Jumlah Bangunan yang dibangun untuk sarana penampungan anak terlantar (Unit)	-	-	
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar		Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	10	8.000.000	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar		Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	10	8.000.000	
Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar		Jumlah dokumendata hasil Veriifikasi dan Validasi Data untuk Anak Terlantar (dokumen)	1	35.000.000	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar		Jumlah dokumendata hasil Veriifikasi dan Validasi Data untuk Anak Terlantar (dokumen)	1	35.000.000	

Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	8	86.000.000	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	8	86.000.000
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar		Jumlah kegiatan pembinaan bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mendapatkan peningkatan keterampilan (Kegiatan)	1	50.000.000	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar		Jumlah kegiatan pembinaan bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mendapatkan peningkatan keterampilan (Kegiatan)	1	50.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan anak terlantar yang dilakukan (kegiatan)	1	25.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan (kegiatan)	1	25.000.000
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas.</b>		Persentase Disabilitas Fisik dan Mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (Persen)	<b>65,05</b>	<b>241.500.000</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas.</b>		Persentase Disabilitas Fisik dan Mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (Persen)	<b>65,05</b>	<b>241.500.000</b>
Pendataan penyandang cacat dan penyakit		jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data untuk	1	50.000.000	Pendataan penyandang cacat dan penyakit		Cakupan kecamatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data	1	50.000.000

kejiwaan		penyanggah cacat dan eks trauma (kegiatan)			kejiwaan		untuk Penyandang Cacat dan Eks Trauma (kecamatan)			
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma		Jumlah gedung Perawatan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dibangun (Unit)	0	-	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma		Jumlah gedung Perawatan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dibangun (Unit)	0	-	
Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma		Jumlah Penyandang Cacat/ Disabilitas dan Eks Trauma yang dididik dan dilatih (Orang)	13	55.500.000	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma		Jumlah Penyandang Cacat/ Disabilitas dan Eks Trauma yang dididik dan dilatih (Orang)	13	55.500.000	
Pendayagunaan para Disabilitas dan Eks Trauma		jumlah bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan penyandang disabilitas dan eks trauma (orang)	9	86.000.000	Pendayagunaan para Disabilitas dan Eks Trauma		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan paket bantuan pemberdayaan (Orang)	9	86.000.000	
Peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan pelatih		jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik (pelatih) penyandang cacat dan eks trauma (kegiatan)	1	50.000.000	Peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan pelatih		Jumlah Tenaga Pendidik (Pelatih) bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang yang terdidik dan terlatih (Orang)	1	50.000.000	
<b>Program Pembinaan Eks Penyandang</b>		Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,	19,5	<b>166.000.000</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang</b>		Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks	19,5	<b>166.000.000</b>	

<b>Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).</b>		PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (Persen)			<b>Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).</b>		Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (Persen)		
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial		Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (Orang)	25	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial		Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (Orang)	25	55.000.000
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial		Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Pembinaan dan Pemberdayaan (Orang)	8	86.000.000	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial		Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Pembinaan dan Pemberdayaan (Orang)	8	86.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya (kegiatan)	1	25.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan (kegiatan)	1	25.000.000
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan</b>		Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	6,06	<b>690.000.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan</b>		Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	6,06	<b>690.000.000</b>

Kesejahteraan Sosial.	(WKBSM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Persen)			Kesejahteraan Sosial.	(WKBSM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Persen)		
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	jumlah kegiatan pelibatan dunia usaha yang berperan dalam usaha kesejahteraan masyarakat (kegiatan)	1	70.000.000	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	jumlah kegiatan pelibatan dunia usaha yang berperan dalam usaha kesejahteraan masyarakat (kegiatan)	1	70.000.000
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bone (Karang Taruna)	2	80.000.000	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bone (Karang Taruna)	2	80.000.000
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan/pelatihan (Kegiatan)	1	250.000.000	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan/pelatihan (Kegiatan)	1	250.000.000
Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	jumlah pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial pada kecamatan di kabupaten bone (kecamatan)	5	50.000.000	Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	jumlah pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial pada kecamatan di kabupaten bone (kecamatan)	5	50.000.000

Pemberdayaan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan sosial (Orang)	5	50.000.000	Pemberdayaan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan sosial (Orang)	5	50.000.000
Pemberdayaan Panti Sosial		Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Panti)	1	40.000.000	Pemberdayaan Panti Sosial		Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Panti)	1	40.000.000
Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial		jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pendamping dan petugas sosial (kegiatan)	1	150.000.000	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial		jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pendamping dan petugas sosial (kegiatan)	1	150.000.000
<b>Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial</b>		Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani (Areal)	1	185.000.000	<b>Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial</b>		Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani (Areal)	1	185.000.000
Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman		jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana areal taman makam	1	65.000.000	Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman		jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana areal taman makam	1	65.000.000

Makam Pahlawan		pahlawan (kegiatan)			Makam Pahlawan		pahlawan (kegiatan)			
Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial		jumlah kegiatan partisipasi organisasi/lembaga/dunia usaha yang dalam peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (kegiatan)	1	70.000.000	Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial		jumlah kegiatan partisipasi organisasi/lembaga/dunia usaha yang dalam peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (kegiatan)	1	70.000.000	
Pelaksanaan Expo Kesetiakawanan Sosial		jumlah pelaksanaan kegiatan ekspo organisasi sosial/lembaga dalam pelaksanaan HKS (Kegiatan)	1	50.000.000	Pelaksanaan Expo Kesetiakawanan Sosial		jumlah pelaksanaan kegiatan ekspo organisasi sosial/lembaga dalam pelaksanaan HKS (Kegiatan)	1	50.000.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bone senantiasa disusun berdasarkan mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada BAB II Bagian Kesatu Pasal 7 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top down – bottom up.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya untuk mensinergikan ke 4 (empat) pendekatan tersebut ke dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, baik dalam Renstra maupun dalam Rencana Kerja (Renja) serta RKA dan DPA. Sehingga diharapkan dari tahun ke tahun proses penyusunan perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan pembangunan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan daerah dan mensinergikan beberapa pendekatan tersebut, sangat dibutuhkan berbagai input untuk dianalisis, diolah, dibahas, serta menjadi bahan perumusan program kegiatan dalam perencanaan tersebut. Semakin lengkap data yang tersedia dan bisa dipergunakan dalam proses penyusunan perencanaan, maka output perencanaan pembangunan tersebut akan bisa lebih baik, berkualitas dan akuntabel.

Salah satu data yang penting sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan adalah usulan dari hasil Musrenbang termasuk dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbangdes, Musrenbang RKPD Kecamatan, Forum PD/Forum Gabungan PD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten, termasuk hasil Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Bone dan usulan masyarakat lainnya yang telah diintegrasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kabupaten Bone.

Usulan yang masuk menjadi bagian dari 5 usulan prioritas setiap desa yang ditujukan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Bone termasuk Dinas Sosial. Kemudian usulan yang telah diproses akan dirangking lagi berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia. Adapun mekanisme yang ditempuh untuk memilih usulan yang adalah dengan melakukan beberapa mekanisme yakni:

1. Melakukan pengecekan data masyarakat miskin melalui Basis Data Terpadu (BDT) pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) kami rekapitulasi berdasarkan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan.
2. Melakukan Survei awal pada lokasi usulan atau calon penerima manfaat baik berupa jaminan sosial, bantuan sosial, Usaha Ekonomis Produktif (UEF) maupun jenis bantuan lainnya.
3. Meminta dukungan data melalui pengajuan Proposal terkait gambaran profil penerima manfaat dan jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan calon penerima manfaat.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja yang diintegrasikan dengan sistem perencanaan yang lain untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2020 yang utuh. Adapun usulan masyarakat yang masuk yang telah disinkronkan dengan jenis kegiatan yang sesuai usulan tersebut tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5.1.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi		Persentase PMKS yang Tertangani (Persen)		
		Kelurahan bukaka Kec. Tanete Riattang	Bantuan Modal Usaha Kelompok Perempuan	100 Paket	
		Kelurahan Cellu Kec. Tanete Riattang Timur	Bantuan Modal Usaha Kelompok Perempuan	4 Kelompok	
		Massenreng Pulu Kec. Sibulue	Pengadaan Mesin Jahit bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1 Kelompok	
		Letta Tanah Kecamatan Sibulue	Pengadaan Mesin Jahit bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1 Kelompok	
		Kecamatan Palakka	Bantuan KUBE Penjahitan	1 Paket	
		Desa Galung Kecamatan Ulaweng	Bantuan Modal Usaha Kelompok Perempuan	3 Kelompok	
		Desa Sappewalie Kecamatan Ulaweng	Bantuan Modal Usaha Kelompok Perempuan	3 Kelompok	
		Desa Mallinrung Kecamatan Libureng	Bantuan KUBE Mesin Jahit	1 Kelompok	
		Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoe	Bantuan KUBE Mesin Jahit	1 Paket	
		Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe	Bantuan KUBE Mesin Jahit	1 Paket	
		Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe	Bantuan KUBE Mesin Jahit	1 Paket	
		Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe	Bantuan KUBE Mesin Jahit	1 Paket	

	Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir		Persentase PMKS yang Tertangani (Persen)		
		Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat	Pengadaan Bantuan Barang Usaha KUBE	1 Paket	
		Desa Ajangpulu Kecamatan Cina	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pertukangan Kayu	1 Paket	
		Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue	Bantuan Alat Pertukangan bagi Fakir Miskin daerah pesisir	1 Kelompok	
		Desa Salebba Kecamatan Ponre	Bantuan Alat Pertukangan (Somel)	1 Unit	
		Semua Dusun Kecamatan Awangpone	Bantuan KUBE Mesin Jahit	1 Kelompok	
		Desa Jompie Kecamatan Ulaweng	Pengadaan Bantuan Barang Usaha KUBE	4 Paket	
	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin		Persentase PMKS yang Tertangani (Persen)		
		Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangpone	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Mesin Jahit)	1 Kelompok	
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
			Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (Persen)		
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia		Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	1 Paket	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial tahun 2013-2018, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat, pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungnya akan bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan dibidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

Dari Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Propinsi, permasalahan eksternal yang sedang dan kemungkinan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2019-2023 mendatang dapat dilihat kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dari besarnya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada sisi lain permasalahan tingginya angka putus sekolah, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat digambarkan faktor yang menjadi Penghambat maupun Pendorong dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

- Periode Waktu Pelaksanaan RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD yang tidak beriring, sehingga dalam perencanaan sering kali dijumpai perbedaan
- Penentuan Indikator PMKS yang terkadang menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sasaran
- Dinas Sosial Kabupaten Bone kurang dilibatkan dalam Penyusunan RENSTRA K/L
- Besarnya Jumlah Populasi PMKS di Kabupaten Bone.
- Adanya Inkonsistensi Dukungan Pendanaan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan di RENSTRA K/L terutama untuk pemenuhan anggaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

b. Faktor Pendorong

- Ketersediaan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendanai Program Nasional yang dilaksanakan di daerah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial lainnya

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone, maka Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu Perangkat Daerah melakukan penyesuaian secara teknis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone tersebut dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tujuan :**

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial**
- 2. Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.**

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Dinas Sosial Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

**Sasaran :**

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.**
- 2. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).**
- 3. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.**

Jika digambarkan dalam bentuk tabel, maka akan tergambar tentang tujuan dan sasaran serta indikator masing – masing disertai target yang akan dicapai mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima atau dengan kata lain, mulai dari tahun 2018 – 2023.

**Tabel 3.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Tahun 2018	Tahun2019	Tahun2020	Tahun2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	CC	B	<b>B</b>	BB	BB	A
2.	Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Tertangani	95,35	96,15	<b>96,55</b>	97,32	97,89	99,50
		Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	4,03	5,05	<b>6,06</b>	7,07	8,08	9,09

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Penyusunan Program dan Kegiatan senantiasa mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang nomor akun (rekening), item – item nama program serta nama-nama kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan yang dilakukan tetap tersistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Program dan Kegiatan yang ada terbagi atas 2 yakni yang sifatnya rutin dan sifatnya non rutin (teknis). Adapun Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Rutin
2. Program dan Kegiatan Non Rutin (Teknis)

**Tabel 3.3.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

lembar ..... dari .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	100	775.000.000	APBD		100	737.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa komunikasi (telepon/Faximile/Internet, TV Kabel dan Air) (Rekening)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	60	60.000.000	APBD		60	70.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayarkan (STNK)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	16	7.500.000	APBD		19	10.000.000

			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	312	100.000.000	APBD		312	110.000.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor tersedia (paket)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	12	11.000.000	APBD		12	13.000.000
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	60	12.000.000	APBD		60	14.000.000
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti (kegiatan)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	50	300.000.000	APBD		50	320.000.000
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	48	170.000.000	APBD		48	200.000.000
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)</b>	<b>Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone</b>	<b>100</b>	<b>1.934.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>534.000.000</b>
			Kegiatan Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	1	1.500.000.000	APBD		0	-
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat	2	66.000.000	APBD		3	95.000.000



			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeluer yang di pelihara (Kegiatan)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	12	1.000.000	APBD		12	1.500.000
			Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (paket)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	0	-	APBD		1	75.000.000
			<b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)</b>	<b>Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>49.000.000</b>
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	2	45.000.000	APBD		2	49.000.000
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Cakupan Realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)</b>	<b>Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>75.000.000</b>
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun (Dokumen)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone	8	50.000.000	APBD		8	75.000.000
			<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)</b>	<b>Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>115.000.000</b>
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran yang tersusun (Dokumen)	Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat	5	75.000.000	APBD		6	115.000.000

					Watampone					
			<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Persen)</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>96,55</b>	<b>932.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>97,32</b>	<b>1.025.200.000</b>
			Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang terlatih dan mampu melaksanakan tugasnya (Orang)	Kabupaten Bone	15	25.000.000	APBD	15	30.000.000
			Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang terlatih yang mampu menjalankan dan meningkatkan usahanya (Kelompok)	Kabupaten Bone	3	125.000.000	APBD	4	150.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin.	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan di Kabupaten Bone (Kelompok)	Kabupaten Bone	9	85.000.000	APBD	9	85.000.000
			Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mempunyai keterampilan kerja (Orang)	Kabupaten Bone	30	50.000.000	APBD	30	50.000.000
			Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan.	Jumlah Koordinasi kecamatan yang melaksanakan program Keluarga harapan (kegiatan)	Kabupaten Bone	12	200.000.000	APBD	12	250.000.000
			Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan (Kelompok)	Kabupaten Bone	5	60.000.000	APBD	5	60.000.000
			Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	jumlah koordinasi kecamatan yang menjadi lokus pendataan PMKS dan PSKS (Kegiatan)	Kabupaten Bone	12	250.000.000	APBD	12	350.000.000

			Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan bimbingan dan bantuan kesejahteraan sosial (Kelompok)	Kabupaten Bone	5	60.000.000	APBD		5	60.000.000
			Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat terpencil lainnya	Jumlah Kelompok masyarakat KAT dan Masyarakat terpencil yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (Kelompok)	Kabupaten Bone	3	60.000.000	APBD		3	80.000.000
			Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin yang mendapatkan pembekalan tentang keterampilan berusaha (Kelompok)	Kabupaten Bone	2	60.000.000	APBD		3	70.000.000
			Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	Jumlah Koordinasi Kecamatan yang menjadi lokus pelayanan bantuan stimulan (Kegiatan)	Kabupaten Bone	12	70.000.000	APBD		12	90.000.000
			<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>87,15</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90,25</b>	<b>1.030.000.000</b>
			Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS khususnya bagi Paca dan Lansia yang responsif gender (paket)	Kabupaten Bone	1	250.000.000	APBD		0	-
			Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Sosial yang tertangani (Orang)	Kabupaten Bone	10	50.000.000	APBD		10	50.000.000
			Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana (Kegiatan)	Kabupaten Bone	1	100.000.000	APBD		-	-
			Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak PMKS yang mendapatkan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	Kabupaten Bone	25	70.000.000	APBD		25	70.000.000
			Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah PMKS termasuk korban bencana yang mendapatkan pelayanan Psikososial yang terlayani (Orang)	Kabupaten Bone	50	50.000.000	APBD		50	50.000.000

			Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	Jumlah Pusat Informasi PMKS yang terbentuk (unit)	Kabupaten Bone	-	-	APBD		1	350.000.000
			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Publik untuk PMKS dalam pelaksanaan Rehabilitasi (Unit)	Kabupaten Bone	1	80.000.000	APBD		-	-
			Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Buku, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis tentang PMKS yang diterbitkan (Eksamplar)	Kabupaten Bone	30	65.000.000	APBD		-	-
			Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	jumlah koordinasi kecamatan pelaksanaan koordinasi dalam perumusan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan (kegiatan)	Kabupaten Bone	12	90.000.000	APBD		12	90.000.000
			Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	jumlah pelayanan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial (kegiatan)	Kabupaten Bone	12	80.000.000	APBD		12	100.000.000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	jumlah pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi korban bencana sosial (kegiatan)	Kabupaten Bone	12	60.000.000	APBD		12	70.000.000
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	jumlah pelayanan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi korban bencana alam (kegiatan)	Kabupaten Bone	12	60.000.000	APBD		12	75.000.000
			Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang memperoleh perlindungan sosial (orang)	Kabupaten Bone	5	50.000.000	APBD		5	50.000.000
			Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang terlayani dan memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	Kabupaten Bone	7	90.000.000	APBD		9	100.000.000

			<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (Persen)	<b>Kabupaten Bone</b>	50	<b>204.000.000</b>	APBD		75	<b>574.500.000</b>
			Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar	Jumlah Bangunan yang dibangun untuk sarana penampungan anak terlantar (Unit)	Kabupaten Bone	-	-	APBD		1	350.000.000
			Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (Orang)	Kabupaten Bone	10	8.000.000	APBD		12	8.500.000
			Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Jumlah dokumendata hasil Veriifikasi dan Validasi Data untuk Anak Terlantar (dokumen)	Kabupaten Bone	1	35.000.000	APBD		1	45.000.000
			Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	Kabupaten Bone	8	86.000.000	APBD		9	96.000.000
			Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Jumlah kegiatan pembinaan bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mendapatkan peningkatan keterampilan (Kegiatan)	Kabupaten Bone	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan anak terlantar yang dilakukan (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
			<b>Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas.</b>	Persentase Disabilitas Fisik dan Mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (Persen)	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>65,05</b>	<b>241.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>76,9</b>	<b>202.000.000</b>
			Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data untuk penyandang cacat dan eks trauma (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	50.000.000	APBD		0	-
			Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah gedung Perawatan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dibangun (Unit)	Kabupaten Bone	0	-	APBD		1	150.000.000

			Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat/ Disabilitas dan Eks Trauma yang dididik dan dilatih (Orang)	Kabupaten Bone	13	55.500.000	APBD		14	56.000.000
			Pendayagunaan para Disabilitas dan Eks Trauma	jumlah bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan penyandang disabilitas dan eks trauma (orang)	Kabupaten Bone	9	86.000.000	APBD		10	96.000.000
			Peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan pelatih	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik (pelatih) penyandang cacat dan eks trauma (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
			<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).</b>	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (Persen)	<b>Kabupaten Bone</b>	19,5	<b>166.000.000</b>	APBD		21,75	<b>181.000.000</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (Orang)	Kabupaten Bone	25	55.000.000	APBD		30	60.000.000
			Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Pembinaan dan Pemberdayaan (Orang)	Kabupaten Bone	8	86.000.000	APBD		9	96.000.000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
			<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</b>	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Persen)	<b>Kabupaten Bone</b>	6,06	<b>690.000.000</b>	APBD		7,07	<b>730.000.000</b>
			Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	jumlah kegiatan pelibatan dunia usaha yang berperan dalam usaha kesejahteraan masyarakat (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	70.000.000	APBD		1	70.000.000
			Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bone (Karang Taruna)	Kabupaten Bone	2	80.000.000	APBD		3	100.000.000

		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan/pelatihan (Kegiatan)	Kabupaten Bone	1	250.000.000	APBD		1	250.000.000
		Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	jumlah pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial pada kecamatan di kabupaten bone (kecamatan)	Kabupaten Bone	5	50.000.000	APBD		6	60.000.000
		Pemberdayaan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan sosial (Orang)	Kabupaten Bone	5	50.000.000	APBD		6	60.000.000
		Pemberdayaan Panti Sosial	Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Panti)	Kabupaten Bone	1	40.000.000	APBD		1	40.000.000
		Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial	jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pendamping dan petugas sosial (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
		<b>Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial</b>	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani (Areal)	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>1</b>	<b>185.000.000</b>	APBD		<b>1</b>	<b>190.000.000</b>
		Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana areal taman makam pahlawan (kegiatan)	- Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone Jalan Gatot Subroto No. 1 Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Watampone - Taman Bahagia (Taman Makam Kajuara) Jalan Poros Watampone – Sinjai KM. 69 Kelurahan Awang Tangka Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone	1	65.000.000	APBD		1	70.000.000

			Pengembangan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	jumlah kegiatan partisipasi organisasi/lembaga/dunia usaha yang dalam peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (kegiatan)	Kabupaten Bone	1	70.000.000	APBD		1	70.000.000
			Pelaksanaan Expo Kesetiakawanan Sosial	jumlah pelaksanaan kegiatan ekspo organisasi sosial/lembaga dalam pelaksanaan HKS (Kegiatan)	Kabupaten Bone	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>6.418.000.000</b>				<b>5.442.700.000</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan sasaran merupakan objek yang akan menjadi fokus dalam penerapan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Jika kedua hal ini dapat direalisasikan dengan baik, maka tujuan program dan kegiatan juga akan tercapai secara maksimal.

Berdasarkan Indikator Kinerja tersebut di atas beserta kelompok sasaran yang ingin dicapai, maka dana indikatif beserta sumbernya untuk digunakan pada tahun anggaran 2020 selain diharapkan bersumber dari

1. Dana alokasi APBD Kabupaten;
2. Dana dari APBD Provinsi; dan
3. Dana sharing melalui dana dekonsentrasi, dana hibah atau dana lainnya dari alokasi APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
4. Dana *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)* yang berasal dari perusahaan.

Dengan mempertimbangkan sumber dana dari APBD II sangat terbatas alokasinya dalam menjalankan program/kegiatan yang ada, maka untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan program sangat diharapkan adanya sumber dana, baik yang bersumber dari alokasi APBD I maupun alokasi APBN yang jumlahnya lebih besar berupa penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dikatakan bahwa jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintah propinsi. Dengan demikian diharapkan kucuran dana untuk untuk membiayai program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan agar nantinya seluruh program/kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman dalam rangka penyusunan RKA-DPA PDDinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020.

Apabila masih ada kekurangan dalam penulisan Rencana Kerja ini, diharapkan adanya pembinaan lebih lanjut baik mengenai kata perkata maupun dalam penyusunan sistematika penulisan serta substansi dari Rencana Kerja ini demi mewujudkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan guna Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang seutuhnya yang akan menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Bone 2013-2018 yakni **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**.